

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menyoroti evaluasi kebijakan ganjil-genap di ruas Jalan Jenderal Sudirman dalam mengatasi kemacetan di Jakarta, dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan ganjil-genap di ruas Jalan Jenderal Sudirman dalam mengatasi kemacetan kota Jakarta Tahun 2024 dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, dan ketepatan berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ganjil-genap belum mampu secara optimal mengatasi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman sebagaimana tujuan awal kebijakan tersebut ditetapkan.

Dari segi efektivitas, kebijakan ini hanya mampu menurunkan volume kendaraan pribadi pada waktu-waktu tertentu, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas secara keseluruhan. Hal ini diperburuk dengan adanya pergeseran arus kendaraan ke jalan-jalan alternatif yang justru menciptakan titik kemacetan baru, sehingga tujuan pengurangan beban lalu lintas menjadi tidak tercapai secara merata.

Secara efisiensi, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi kendala pada aspek penggunaan sumber daya, baik dari sisi personel lapangan, infrastruktur teknologi pemantau (seperti ETLE), hingga anggaran operasional yang belum dimanfaatkan secara optimal. Proses sosialisasi kebijakan yang kurang merata serta pengawasan yang lemah

juga menunjukkan bahwa hasil yang dicapai tidak sebanding dengan upaya dan biaya yang dikeluarkan.

Dari sisi ketepatan, kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi pengguna jalan. Ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi masih tinggi, terutama karena akses dan kenyamanan transportasi umum belum merata. Selain itu, waktu dan wilayah penerapan kebijakan belum disesuaikan secara fleksibel dengan pola mobilitas masyarakat, sehingga penerapannya masih bersifat administratif dan kaku. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman belum efektif, efisien, maupun tepat sasaran dalam mengatasi kemacetan. Implementasinya belum didukung oleh sistem transportasi umum yang memadai, belum mampu mengubah perilaku mobilitas masyarakat secara menyeluruh, serta masih menghadapi kendala teknis dan perilaku dalam proses pelaksanaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya peningkatan efektivitas kebijakan ganjil-genap maupun perencanaan kebijakan lalu lintas lainnya di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi Transportasi Umum: Pemerintah perlu mempercepat pengembangan dan integrasi sistem transportasi publik agar dapat menjadi

alternatif utama yang menarik bagi masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

2. Perbaikan Manajemen Arus Kendaraan Alternatif: Jalur-jalur yang menjadi pilihan alternatif saat kebijakan ganjil-genap berlaku harus dirancang dan diawasi secara lebih baik agar tidak menimbulkan kemacetan baru.
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan masih rendah. Oleh karena itu, pengawasan di lapangan serta penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti ETLE secara lebih maksimal.
4. Evaluasi dan Penyesuaian Wilayah dan Waktu Penerapan: Pemerintah perlu menyesuaikan waktu dan wilayah penerapan kebijakan berdasarkan pola mobilitas masyarakat yang aktual, bukan hanya berdasarkan asumsi administratif.
5. Pertimbangan Kebijakan Tambahan: Pemerintah dapat mempertimbangkan skema kebijakan lanjutan seperti congestion pricing atau electronic road pricing (ERP) untuk memperluas efektivitas kontrol terhadap volume kendaraan di kawasan-kawasan padat.